

Hari Merdeka. Merdeka dari Apa?

Seorang tetangga memisuh dari pagi, *pas* *penyajian* Galungan. Dalam cercaannya ia menghujat temannya rela membeli penjur Galungan yang wah dan mahal. Padahal menurutnya, temannya itu pelit dan banyak hutang. Diapun sampai *kepo* ke tukang penjur, apakah temannya itu membeli kontan atau masih kredit. *Blah, wah!* Lain waktu, tetangga itu juga cerita hal yang sama namun dengan objek yang berbeda. Ia mencela temannya yang lain karena menyewa properti perkawinan untuk anaknya dengan harga mahal. Kori kardus yang disewa satu juta per hari, foto *prewedding* dan *catering* membuat temannya itu sam-pai harus menjual tanah warisan leluhurnya. Padahal menurutnya, bantem pawaiwahan itu tak lebih dari 10 juta saja. *Hah!*

Dua cerita kecil itu kami hidup dimana-mana, tidak saja di kota tetapi juga di kampung-kampung yang mungkin jauh malah lebih semarak. Dan soal ini bukan kan baru, namun tetap saja menarik. Tentu juga penuh perdebatan, dan biasanya diskusi ini tak menghasilkan apa-apa. *Paling-paling mekrimikan* di belak-kang, *ngedamel* untuk menyamakan hati saja.

Melaksanakan perayaan hari suci bisa dengan ragam cara dan tingkatannya. Tersedia banyak jalan, dari *nistamaning nista* hingga *utamaming utama* juga

kepura-puraannya meyadnya dengan canang *asebit* tanpa *sewari* agar terlihat merakyat, dan citra diri yang membumi. Padahal ia diberi kesempatan oleh Tuhan dengan kekayaan dan materi agar bisa bermanfaat dan materi agar bisa bermanfaat untuk kehidupan dan banyak orang. Jika benar cerita tetangga itu, sungguh miris juga melihat umat Hindu bertomba-lomba dengan citra diri yang *mampuh* dan banyak uang, meskipun itu juga dilakukan dengan kepura-puraan.

Kedua orang itu, dan tentu juga mewakili banyak orang yang sejenis, ternyata masih belum bisa memerdekakan dirinya pada keterikatan. Ada yang cinta dengan citra sederhana, ada yang menyukai glamoritas. Padahal dalam salah satu kitab darsana, jelas dan tegas disebutkan bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapai kemerdekaan, menggapai kebebasan paripurna jika masih *wesna* pada kemelekatan. Cinta dan *wesna* yang berlebihan adalah sumber penderitaan. Sedangkan Krishna dalam wej-angannya kepada Sang Partha juga jelas menyatakan siapapun dari kita yang sanggup memerdekakan diri dari keterikatan karma akan menemukan keles-pasan. Bahkan puncak kesadaran justru ada pada sikap kita memandangi realitas dengan cara biasa-biasa saja.

Tetangga saya itu, juga mewakili kita semua, tidak sepem-bunya juga merdeka karena masih saja *ngorotang timpal* yang takutnya menjadi *pristana* dan *boax*. Syukur jika ceritanya benar, tapi memburukannya kepada orang lain tetap saja tidak *pas*. Kita mungkin tidak perlu bercerita, tetapi pengalaman itu baiknya menjadi satu renungan, refleks di diri. Seperti saat ber-puasan tetapi di depan mata pe-milih dengan makanan enak, itulah godaan iman. Jika lulus, isti-mewa pula hasilnya. Arjuna per-mah sukses dengan cara ini saat ia dikelilingi para bidadari yang menan-nari tanpa sehalat benang. Dalam tapanya ia kukuh, tak ter-goda, meskipun ia punya riwayat panjang sebagai pria yang sang-gup memesonona perempuan. Akhirnya, panah pasupati anu-grah Bhatara Siwa digenggam-nya dengan kontemplasi men-dalam. Arjuna merdeka dari egonya, sifat tamas dan rajasnya. Lalu merdeka apa yang lain?

Baru-baru ini jagat media sosial dibehebohan dengan berita umat Hindu yang ditolak ke-inginannya membangun tempat suci. Seperti biasa, kita juga larut dalam *gebyah* *awab* itu. Pesan berantai, yang bisa saja ditambah atau dikurangi, menjadi makanan empuk yang tak mampu memer-dekakan diri dengan cara cerdas berliterasi. Segera saja umat Hindu yang kebanyakan di luar

Bekasi, Jawa Barat kepanasan. Ujaran kebencian malah muncul menyering umat Islam yang "katanya" menolak pendirian pura. Padahal ada cerita panjang yang belum selesai, dan kini se-dang dimusyawarahkan, meski hasilnya masih belum terang benar. Sebaliknya disebarkan melalui mekamsine hukum, de-Peraturan Bersama Menteri Da-lam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan Nomor 8 tentang Pendirian Rumah Ibadat.

Tak pernah, seperti kasus pendirian tempat ibadah dari agama apa saja, menandakan kehidupan beragama kita masih belum juga merdeka. Padahal jika mengacu pada aturan ter-sebut, tak perlu ada tafsir lain. Bahkan peraturan yang jauh lebih tinggi sudah diatur dalam UUD 1945. Tapi ini lagi-lagi soal ego, ada relasi yang tidak dia-metral antara pemerintah dan umat, serta jika harus terpaksa menggunakan istilah pengantun mayoritas-minoritas, ada hege-moni dan dominasi. Di masing-masing propinsi selalu saja ada masalah klasik ini, tak hanya Is-lam tetapi Katolik di NTT, Kris-ten di Papua, dan Hindu di Bali. Jadi, secara mikro dalam menjalankan *swadharmaning agama*, harus diakui secara sa-ras dar kita masih belum merdeka. Ini menjadi pekerjaan rumah kita untuk terus mencerdakan umat

agar dalam menjalankan agama-nya dengan *ening suci nirmala*. Tak ada *pristana* dan *pakrimakan* lagi. Ditingskat makro, dalam menjalankan *swadharmaning negara*, kita juga masih belum merdeka-merdeka amat. Masih banyak umat Hindu, tidak saja di luar Bali yang tantangannya memang sangat berat, tetapi juga di Bali yang karena terlalu nyaman dan terus merasa aman, belum sanggup menampakkan posturnya yang setara dengan umat lain.

Indikatornya gampang saja, seberapa bagus data kualitas umat Hindu dari aspek pendid-ikan, ekonomi dan kesehatan? Padahal tiga indikator ini men-jadi alat sederhana untuk menilai indeks pembangunan manusia. Mari merdekakan umat Hindu dengan otak yang cerdas (pendidikan), peruntung yang ke-nyang (ekonomi) dan jiwa raga-nya yang seimbang (kesehatan). Ketiganya adalah alat untuk me-merdekakan umat Hindu meraih kebahagiaan lahir batin, *atma-na ca ita dharna*.

Penulis, antropolog HDN Denpasar



I Nyoman Yoga Segara